

PUSDIKLATWAS BPKP

**RENCANA STRATEGIS
2015-2019**

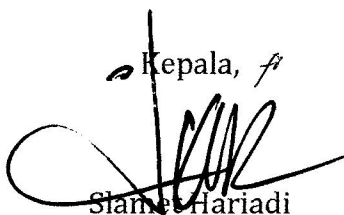
**PERATURAN KEPALA PUSDIKLATWAS BPKP
NOMOR 89 TAHUN 2016
TANGGAL 4 FEBRUARI 2016**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Pusdiklatwas BPKP periode 2015-2019 mengalami perubahan selaras dengan perubahan Rencana Strategis BPKP periode 2015-2019, yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2015-2019. Renstra Pusdiklatwas BPKP Tahun 2015-2019 ini merupakan dokumen perencanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan periode 2015-2019 yang berisi visi yaitu keadaan umum yang diinginkan pada akhir periode Renstra atau setelahnya, misi atau upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, dan strategi atau program-program dan kegiatan-kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai visi dan misi tersebut.

Dalam Renstra ini juga telah ditetapkan Target kinerja berupa target hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) yang akan menjadi komitmen bersama untuk dapat mencapai target-target kinerja tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan tetap menjaga komitmen terhadap pencapaian target kinerja BPKP yang relevan. Oleh karena itu, dokumen Renstra ini wajib menjadi acuan pada saat menyusun kebijakan Pusdiklatwas BPKP, dengan demikian diharapkan terdapat harmonisasi dan keterpaduan langkah untuk mewujudkan visi dan misi Pusdiklatwas BPKP.

Ciawi, Pebruari 2016

Kepala, *f*

Slamet Hariadi

NIP 19591212 198112 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. KONDISI UMUM.....	1
1. <i>Capaian Renstra 2010-2014</i>	1
2. <i>Analisis Kebutuhan Stakeholder</i>	3
C. POTENSI DAN PERMASALAHAN	4
1. <i>Potensi dan Permasalahan</i>	4
2. <i>Peluang dan Tantangan</i>	6
BAB II VISI MISI DAN TUJUAN	9
A. VISI PUSDIKLATWAS BPKP	9
B. MISI BPKP	9
C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PUSDIKLATWAS BPKP 2019.....	10
D. NILAI-NILAI PUSDIKLATWAS BPKP	12
E.. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN	14
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	18
A. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PUSDIKLATWAS BPKP	18
B. PROGRAM DAN KEGIATAN	20
C. TARGET KINERJA DAN PENDANAAN	22
BAB V PENUTUP	23
LAMPIRAN	24

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Renstra BPKP periode 2015-2019 mengalami perubahan yang signifikan dengan adanya perubahan visi baru BPKP yaitu sebagai “*Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional*”. Perubahan visi ini tentunya juga diikuti dengan perubahan signifikan pada arah kebijakan dan strategi untuk mencapai visi baru tersebut, sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra BPKP 2015-2019.

Perubahan Renstra BPKP tentunya mempengaruhi Pusdiklatwas BPKP. Sebagai unit kerja pendukung, Pusdiklatwas BPKP harus mampu menyusun Rencana Strategi yang sinergis dan terintegrasi dalam rangka mendukung pencapaian visi BPKP tersebut, namun tetap dalam koridor pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklatwas BPKP sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tanggal 20 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dimana Pusdiklatwas BPKP mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Pusdiklatwas menyelenggarakan fungsi sebagai:

- a. penyusunan program pendidikan dan pelatihan kedinasan, fungsional dan teknis;
- b. perencanaan, penyusunan, dan pengembangan materi pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis;
- c. perencanaan kebutuhan dan pembinaan widyaiswara dan instruktur;
- d. penyelenggaraan, pembinaan, dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan pembentukan, pengembangan, dan penjurangan jabatan fungsional auditor, serta pendidikan dan pelatihan teknis;
- e. penetapan persyaratan dan pemberian akreditasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembentukan dan penjurangan jabatan fungsional auditor;
- f. evaluasi pelaksanaan hasil pendidikan dan pelatihan serta penyusunan laporannya;
- g. pengelolaan kepegawaian dan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, barang milik/kekayaan negara dan urusan rumah tangga.

Perumusan Visi, Misi, Tujuan, Arah kebijakan dan Strategi Pusdiklatwas BPKP periode 2015-2019 disusun selain mengacu kepada Renstra BPKP 2015–2019, juga mengacu pada hasil analisis terhadap permasalahan, potensi, kelemahan, peluang dan tantangan dalam periode lima tahun mendatang, capaian kinerja selama periode Renstra sebelumnya, serta hasil identifikasi terhadap harapan dan kebutuhan *stakeholders* Pusdiklatwas BPKP.

B. KONDISI UMUM

1. Capaian Renstra 2010 - 2014

Selama periode renstra sebelumnya, Pusdiklatwas BPKP telah menunjukkan kinerja yang baik khususnya dalam rangka meningkatkan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah untuk mendukung terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Strategik BPKP Tahun 2010-2014 melalui kegiatan kediklatan maupun pendukungnya.

Proses pembelajaran yang dikembangkan dalam kegiatan kediklatan diarahkan pada pemanfaatan/penggunaan teknologi informasi yang dapat mempercepat pemenuhan kompetensi auditor dan pengelola keuangan di seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah.

Selain itu Pusdiklatwas selalu berinovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pengembangan bahan ajar berbasis multimedia dan secara terus-menerus mengembangkan diri menjadi tenaga profesional di bidang diklat melalui pembelajaran secara elektronik dengan sistem *e-learning* yang dapat di akses oleh seluruh aparat Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah .

Secara ringkas, program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Kegiatan Diklat Selama periode Tahun 2010 sampai dengan 2014 Pusdiklatwas BPKP telah melaksanakan kegiatan diklat dengan jumlah peserta diklat sebanyak 55.992 orang dari target 33.090 dengan peserta terdiri dari auditor APIP baik pegawai BPKP maupun Non BPKP dan peserta diklat bukan auditor, yang dapat dirinci sebagai berikut:
 - 1) diklat Teknis Substansi sebanyak 41.155 orang;
 - 2) diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) sebanyak 13.350 orang; dan
 - 3) diklat Pimpinan/Kedinasan sebanyak 1.487 orang.
- b. Selama kurun waktu tersebut Pusdiklatwas BPKP telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 dan IWA-2 TUV Nord Germany, yang merupakan jaminan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- c. Penerimaan Widyaiswara selama periode Tahun 2010 sampai dengan 2014 sebanyak 5 orang, dengan demikian jumlah widyaiswara yang dimiliki Pusdiklatwas BPKP saat ini berjumlah 21 orang.
- d. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen yang berfungsi untuk membantu dalam pengolahan data kediklatan dengan mengembangkan berbagai aplikasi, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Aplikasi Kediklatan Teknis Substansi dan Fungsional
 - 2) Aplikasi Evaluasi dan Pelaporan
 - 3) Aplikasi multi media training
 - 4) Aplikasi Cuti
 - 5) Pengembangan Website
 - 6) Pengembangan aplikasi monitoring PBJ
 - 7) Pengembangan aplikasi Desknow
- e. Perolehan akreditasi untuk pelaksanaan kegiatan diklat dari Lembaga Administrasi Negara, untuk diklat sebagai berikut:
 - a. Diklat pembentukan auditor trampil;
 - b. Diklat pembentukan auditor ahli;
 - c. Diklat pembentukan auditor ketua tim;
 - d. Diklat penjenjangan auditor pengendali teknis;
 - e. Diklat auditor penjenjangan pengendali mutu;
 - f. Diklat Teknis Manajerial Pengawasan;
 - g. Diklat teknis Pengadaan Barang dan Jasa;
 - h. Diklat Teknis Audit Pengadaan Barang dan Jasa.
- f. Penyusunan/Revisi Modul dan buku kerja Diklat Teknis Substansi dan Diklat fungsional Auditor
- g. Penyusunan Kurikulum Baru diklat Fungsional Auditor
- h. Pengembangan system pembelajaran e-learning
- i. Implementasi pembelajaran e-learning pada diklat pembentukan Auditor

- j. Penyusunan Peraturan Kepala BPKP No 24 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- k. Penyusunan peraturan kepala Pusdiklatwas BPKP Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Fungsional Auditor.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pusdiklatwas BPKP tersebut merupakan pelaksanaan dari program/kegiatan dalam Renstra Pusdiklatwas BPKP Tahun 2010-20154. Capaian kinerja Pusdiklatwas Tahun 2010-2014 seperti tercantum dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklatwas BPKP Tahun 2010 sampai dengan 2014 menunjukkan hasil yang memuaskan dengan capaian kinerja diatas 100%. Capaian tersebut disumbangkan oleh kinerja atas program dan kegiatan utama pelaksanaan pendidikan dan pelatihan maupun kegiatan pendukungnya. Kegiatan utama diklat dilaksanakan melalui pelaksanaan diklat teknis substansi, diklat fungsional auditor dan diklat kedinasan (diklat kepemimpinan dan pra-jabatan).

2. Analisis Kebutuhan Stakeholders

Harapan para pengguna terhadap hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta kontribusi Pusdiklatwas BPKP secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Ekspektasi Stakeholders dan Kontribusi Pusdiklatwas BPKP

No	Ekspektasi Stakeholders	Kontribusi Pusdiklatwas BPKP
1.	<p>Kepala BPKP, Irjen K/L, Inspektur Daerah Prov/Kab/Kota, Kepala SPI BUMN/D</p> <p>a. Terselenggaranya pembinaan secara efektif atas penyelenggaraan SPIP melalui kediklatan</p> <p>b. Terselenggaranya pengembangan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten melalui kediklatan (misi 3 BPKP)</p>	<p>a. Menyelenggarakan diklat-diklat yang mendukung pembinaan/ penyelenggaraan SPIP</p> <p>b. Menyelenggarakan diklat-diklat yang terkait dengan pengembangan/ peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah</p> <p>c. Menyediakan sarana/prasarana kediklatan termasuk menyediakan modul diklat yang mutakhir dan Widyaiswara/ Instruktur yang kompeten terkait SPIP dan peningkatan kapasitas APIP</p>
2.	<p>Menteri/Gubernur/Walikota/Bupati</p> <p>a. Meningkatnya akuntabilitas keuangan negara/daerah melalui pengembangan kapasitas SDM pengelola keuangan negara/ daerah dengan mengikuti kegiatan kediklatan</p>	<p>a. Penyelenggaraan diklat SPIP pada instansi pemerintah</p> <p>b. Penyelenggaraan diklat teknis substansi lainnya yang menunjang terbangunnya kapasitas manajemen keuangan daerah</p> <p>c. Penyelenggaraan diklat peningkatan</p>

No	Ekspektasi <i>Stakeholders</i>	Kontribusi Pusdiklatwas BPKP
	<ul style="list-style-type: none"> b. Terselenggaranya SPIP yang efektif c. Terbangunnya kapasitas manajemen keuangan daerah melalui kediklatan 	<ul style="list-style-type: none"> kapasitas aparat pengawasan intern di lingkungan pemerintahannya d. Pelaksanaan diklat peningkatan kompetensi pengelola keuangan negara/daerah
3.	Pengguna (Pelaksana pada Instansi Pemerintah dan BUMN/D) <ul style="list-style-type: none"> a. Diperolehnya nilai tambah b. Meningkatnya kompetensi dalam pengelolaan keuangan negara/daerah c. Meningkatnya kemahiran dalam penyusunan laporan keuangan d. Meningkatnya kemampuan untuk menyelenggarakan SPIP yang efektif di lingkungannya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kompetensi Widyaiswara baik dalam penguasaan materi diklat maupun tehnik mengajar b. Pelaksanaan diklat peningkatan kompetensi pengelola keuangan negara/daerah c. Pelaksanaan diklat SPIP bagi penyelenggara tugas d. Penyusunan modul diklat yang mutakhir dan aplikatif untuk dipakai dalam diklat penyusunan laporan keuangan maupun diklat teknis lainnya terkait dengan laporan keuangan e. Pelaksanaan diklat penyusunan laporan keuangan maupun diklat teknis lainnya yang mendukung akurasi penyajian laporan keuangan
4	APIP lainnya <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya pembinaan atas SDM Tenaga auditor yang kompeten, profesional dan bersertifikat b. Kemampuan untuk melakukan kegiatan evaluasi atas SPIP 	<ul style="list-style-type: none"> c. Pelaksanaan diklat kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah d. Pelaksanaan diklat dalam rangka sertifikasi jabatan fungsional auditor e. Pelaksanaan diklat SPIP Pelaksanaan diklat evaluasi SPIP

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Potensi dan Permasalahan

Sejumlah program/kegiatan telah dilakukan Pusdiklatwas BPKP dalam mendukung pencapaian visi/misi Pusdiklatwas BPKP dan visi/misi BPKP secara keseluruhan. Langkah-langkah tersebut, antara lain menyelenggarakan diklat teknis substansi dan diklat/sertifikasi bagi Pejabat Fungsional Auditor BPKP maupun pegawai APIP lainnya, serta penyelenggaraan diklat lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas para pengelola pekerjaan tertentu seperti diklat pengelolaan keuangan negara/daerah, diklat arsiparis, diklat perencanaan, termasuk menyelenggarakan diklat SPIP sesuai mandat BPKP yang tertuang dalam PP 60/2008. Walaupun dalam proses penyelenggaraan masih terdapat permasalahan dalam kegiatan kediklatan, seperti antara lain:

- a. Peserta diklat tidak dapat menerapkan hasil diklat karena tupoksinya yang berubah/pindah unit kerja
- b. Peserta diklat yang dikirim tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan
- c. Hasil diklat belum disebarluaskan oleh peserta diklat pada unit kerjanya
- d. Masih adanya keengganan untuk menerapkan JFA walaupun telah mengikuti diklat JFA
- e. Belum seluruh APIP telah mengikuti Diklat dan Sertifikasi JFA
- f. Masih adanya APIP yang belum pernah mengikuti diklat teknis substansi untuk meningkatkan kompetensinya
- g. Masih adanya pelaksanaan diklat di daerah yang tidak mengacu kepada pedoman pelaksanaan diklat
- h. Masih banyaknya laporan keuangan instansi pemerintah pusat dan daerah yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, walaupun telah sering mengirim pegawainya untuk mengikuti berbagai diklat yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan.

Selain itu dari hasil penilaian risiko di Pusdiklatwas BPKP menggambarkan bahwa pada fungsi utama kegiatan kediklatan terdapat potensi 83 risiko dan 152 dampak, sedangkan pada fungsi dukungan terdapat 104 risiko dan 135 dampak. Dari jumlah tersebut terdapat enam (6) risiko berada di area sangat tinggi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2
RINGKASAN PENILAIAN RISIKO KEGIATAN PUSDIKLATWAS BPKP

No	RISIKO	DAMPAK/AKIBAT
1	Perumusan kegiatan organisasi diklat tidak/belum mengakomodasi aktivitas pendidikan dan pelatihan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan lingkungan/stkeholders/user	<ol style="list-style-type: none"> a. Rancangan kebutuhan diklat untuk membantu stakeholders tidak sesuai dengan kebutuhan terkini b. Tidak sesuainya program diklat dan materi diklat sesuai kebutuhan terkini c. Pusdiklatwas tidak mampu/kurang dapat berperan dalam memberikan kontribusi terhadap terciptanya SDM pengawasan yang profesional
2	Rasio ketersediaan SDM WI/Instruktur dengan jumlah diklat yang tersedia tidak memadai	<ol style="list-style-type: none"> a. Tumpang tindih penugasan akan mempengaruhi kualitas proses belajar mengajar b. Pusdiklatwas merekrut secara kontemporer tenaga pengajar non WI/Instruktur dari luar
3	Tidak tersedianya kurikulum dan modul/bahan ajar yang standar untuk suatu jenis/mata diklat	<ol style="list-style-type: none"> a. Masing-masing pengajar menyediakan bahan ajar yang berbeda, sehingga materi ajar tidak sama untuk pengajar yang berbeda b. Bila tidak cukup waktu untuk menyiapkan, bahan ajar yang disediakan tidak mencakup semua

No	RISIKO	DAMPAK/AKIBAT
		materi ajar c. Tingkat kedalaman materi berbed untuk masing-masing pengajar d. Bahan latihan/kasus tidak dirancang saling terkait antar mata diklat, sehingga menghasilkan kasus komprehensif e. Pemahaman peserta bersifat sepotong-sepotong, dan tidak tuntas f. Sulit untuk menjamin kualitas untuk diklat yang dilakukan perwakilan g. Peserta tidak memiliki bahan ajar ketika proses pembelajaran
4	Quality Procedure yang ditetapkan tidak dijalankan oleh masing-masing bidang secara konsisten dan bertanggung jawab	a. Kualitas produk/pelayanan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pelanggan b. Memperoleh penilaian buruk dari Badan Sertifikasi c. Sertifikat ISO dicabut d. Mempengaruhi reputasi Pusdiklatwas
5	Belum adanya payung hukum pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) kegiatan kediklatan berbasis <i>e-learning</i>	a. Diklat E-learning untuk APiP yang tidak dapat dilaksanakan. b. Motivasi penyelenggara diklat e-learning menjadi rendah
6	Distribusi hari penugasan mengajar WI yang tidak seimbang	a. Timbulnya kesenjangan penugasan diantara sesama WI b. Motivasi WI menjadi rendah

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi tantangan bagi Pusdiklatwas dalam lima tahun mendatang.

2. Peluang dan Tantangan

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis, perhatian terhadap kemungkinan perubahan faktor lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal merupakan hal yang penting. Wujud perhatian tersebut adalah dengan melakukan penilaian terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitarnya yang dapat dilakukan antara lain dengan menerapkan analisis SWOT. Analisis lingkungan baik internal maupun eksternal organisasi merupakan hal yang penting dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan bagi suatu organisasi. Penelaahan atas kondisi internal dapat menghasilkan kekuatan dan kelemahan yang ada dalam organisasi, sedangkan analisis atas kondisi eksternal dapat diketahui peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi. Analisis lingkungan sangat diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi dalam menyikapi setiap perubahan dan perkembangan jaman. Analisis lingkungan yang dirumuskan oleh Pusdiklatwas BPKP sebagai berikut :

Tabel 1.3
ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG, DAN ANCAMAN

Kekuatan (<i>Strengths - S</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses - W</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten di bidang diklat pengawasan dan kapasitas kelembagaan yang memadai. 2. Adanya sarana diklat yang memadai dan dana yang relatif cukup. 3. Tersedianya program diklat dan materi diklat pengawasan yang berkualitas. 4. Kewenangan dari peraturan perundang-undangan. 5. Memiliki jaringan diklat dan informasi melalui Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia. 6. Memiliki pengalaman dalam bidang diklat pengawasan. 7. Memiliki program Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum cukup tersedianya sumber daya manusia perancang diklat. 2. Kemungkinan kuantitas SDM kediklatan dan kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia tidak dapat memenuhi peningkatan permintaan diklat dari <i>stakeholders/customers</i>. 3. Belum memadainya jumlah widyaiswara dan program peningkatan keahlian. 4. Masih diperlukan dukungan dari aspek legal formal (akreditasi) untuk penyelenggaraan beberapa jenis diklat. 5. Kemungkinan demoralisasi SDM.

Peluang (<i>Opportunities - O</i>)	Ancaman (<i>Threats - T</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan diklat pengawasan untuk mewujudkan <i>good governance</i>, seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaantugas pokok dan fungsi pemerintah. 2. Meningkatnya tuntutan profesionalisme di bidang pengawasan, seiring dengan meningkatnya kesadaran untuk mengedepankan nilai-nilai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah. 3. Besarnya dukungan pemerintah terhadap diklat pengawasan akan meningkatkan permintaan atas produk-produk diklat pengawasan yang bersifat spesifik. 4. Kemajuan teknologi dalam bidang diklat pengawasan. 5. Meningkatnya kesadaran untuk bersinergi dalam bidang diklat pengawasan. 6. Meningkatnya tuntutan atas standar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya komitmen pimpinan APIP. 2. Meningkatnya faktor persaingan, karena adanya keinginan lembaga diklat APIP lain untuk menyelenggarakan diklat sendiri, sehingga menurunkan <i>captive market</i>. 3. Penawaran dari pihak luar yang lebih menarik, sehingga memicu eksodus SDM potensial.

<p>mutu dan proses kegiatan diklat pengawasan.</p> <p>7. Meningkatnya kebutuhan untuk dapat mengimplementasikan SPIP di lingkungan kerjanya</p> <p>8. Kebutuhan untuk memperoleh opini WTP dari BPK mendorong peningkatan permintaan diklat pengelolaan keuangan maupun diklat Teknis substansi lainnya yang terkait.</p>	
---	--

Berdasarkan hasil analisis SWOT posisi Pusdiklatwas BPKP berada pada posisi SO (*strength-opportunity*) yang berarti bahwa potensi/kekuatan Pusdiklatwas lebih besar dibanding dengan kelemahannya, dan peluangnya lebih besar dibanding dengan ancamannya. Oleh karena itu, Pusdiklatwas BPKP diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam hal pengembangan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang professional dan kompeten.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

A. VISI

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, termasuk terbitnya mandat baru sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, BPKP menegaskan jati dirinya sebagai Auditor Presiden. Adanya perubahan tersebut sudah tentu berpengaruh terhadap keberadaan organisasi dilingkup BPKP, yang pada akhirnya berpengaruh juga terhadap Pusdiklatwas BPKP sebagai salah satu unit kerja dari BPKP. Yang terpenting dalam hal ini adalah sampai sejauh mana upaya menjawab tuntutan perubahan tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi keberadaan suatu organisasi, dalam arti apakah organisasi tersebut sesuai atau tidak dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dalam menghadapi perubahan tersebut, Pusdiklatwas BPKP harus mampu menciptakan dan/atau memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) melalui produk yang dihasilkannya. Sejalan dengan visi BPKP, "Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya, untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas", Pusdiklatwas berupaya untuk mendukung terwujudnya akuntabilitas keuangan negara, melalui pembelajaran berbasis teknologi informasi yang dapat mempercepat pemenuhan kompetensi auditor di seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah. Selain itu Pusdiklatwas selalu berinovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pengembangan bahan ajar berbasis multimedia dan secara terus-menerus mengembangkan diri menjadi tenaga profesional di bidang diklat melalui pembelajaran secara elektronik dengan sistem *on line* yang dapat di akses oleh seluruh aparat Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah, yang dirumuskan dalam suatu visi, yaitu

"Menjadi Lembaga Diklat Pengawasan Intern yang Terdepan dan Terpercaya"

Pernyataan visi tersebut dirumuskan dan ditetapkan dalam Renstra Pusdiklatwas BPKP Tahun 2015-2019. Makna dari visi tersebut berarti bahwa Pusdiklatwas BPKP berupaya untuk menjadi yang terdepan dalam mengembangkan jenis-jenis diklat, khususnya yang relevan dengan pengawasan intern yang dibutuhkan oleh *stakeholders* disertai penerapan metodologi *training* yang modern berbasis teknologi informasi. Pusdiklatwas BPKP diharapkan mampu bertindak selangkah lebih maju menjadi pelopor atau mempunyai inisiatif dalam pengembangan konsep-konsep, yang kemudian diimplementasikan untuk kepentingan *stakeholders*, dan menjadi terpercaya dengan terus menerus meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan kediklatan untuk *stakeholders*. Dengan demikian, etos kerja, pendekatan dan metodologi, kompetensi teknis, ataupun perangkatperangkat pendukung lainnya dapat menjawab tantangan dan peluang baru, sehingga tidak menjadi usang, tertinggal, dan tidak berdaya guna.

B. MISI

Terwujudnya visi merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap jajaran Pusdiklatwas BPKP. Sebagai bentuk yang lebih nyata dari visi tersebut, maka dijabarkanlah kedalam misi, sehingga Misi Pusdiklatwas BPKP merupakan bentuk nyata dari rumusan visi yang memberikan gambaran mengenai tugas yang diemban oleh Pusdiklatwas BPKP dalam rangka mewujudkan visi. Misi Pusdiklatwas BPKP dirumuskan ke dalam dua rumusan misi, yaitu:

1. Meningkatkan Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparatur Negara di Bidang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

2. Meningkatkan Kapabilitas Manajemen dan Sumber Daya Kediklatan

Misi tersebut pada dasarnya ditetapkan dengan kesadaran akan perlunya keseimbangan antara pencapaian kinerja yang berorientasi pada manfaat keberadaan Pusdiklatwas BPKP bagi *stakeholders* dan pencapaian kinerja yang berorientasi pada aspek pendukung, berupa peningkatan kualitas manajemen diklat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber daya diklat lainnya. Dengan pendekatan ini, selain terkait dengan perspektif *stakeholders* dan *customers* juga terkait dengan *internal process* dan *learning and growth*. Misi ini merupakan implementasi visi yang ditetapkan Pusdiklatwas BPKP dalam membantu pemerintah menghadapi perubahan yang cepat berkenaan dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan terwujudnya sumber daya manusia yang profesional dan kompeten. SDM yang profesional dan kompeten merupakan faktor penentu keberhasilan organisasi, karena sumber daya manusialah yang mengatur dan menggerakkan jalannya organisasi. SDM yang profesional adalah SDM yang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang keahliannya. SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoritis, didukung dengan pengalaman, dan mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar yang berlaku umum dalam lingkungan keahlian tersebut. Keahlian SDM harus terus menerus diperbaharui dan ditingkatkan agar dapat merespon perkembangan kebutuhan pengawasan yang terus berkembang yang salah satunya dengan pembinaan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan pendidikan dan pelatihan auditor (pasal 59 ayat 1 e, PP Nomor 60 Tahun 2008).

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PUSDIKLATWAS

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Dalam penetapan tujuan strategis, Pusdiklatwas BPKP mengadopsi konsep *Balanced Scorecard* (BSC) dengan beberapa modifikasi disesuaikan dengan karakteristik organisasi publik yang disusun oleh BPKP Pusat, hal tersebut karena Pusdiklatwas BPKP adalah salah satu unit kerja sebagai pendukung capaian kinerja yang telah ditetapkan BPKP. Berbeda dengan konsep BSC di sektor privat/bisnis yang berorientasi profit, BPKP memodifikasi Perspektif Keuangan menjadi Perspektif Manfaat Bagi *Stakeholder* dan Perspektif Pelanggan menjadi Perspektif Manfaat Bagi Auditan/Pengguna Jasa. Dengan menggunakan pendekatan strategi berimbang (*balanced scorecard*) tersebut maka tujuan-tujuan utama dari perspektif manfaat bagi pihak *stakeholders* utama dan manfaat kepada auditan/pengguna jasa diseimbangkan dengan tujuan-tujuan pendukung yang berada pada perspektif proses internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang berorientasi ke dalam.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan strategis merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Dengan mengacu kepada misi yang telah dirumuskan dan selaras dengan tujuan BPKP, maka tujuan strategis Pusdiklatwas BPKP adalah:

- a. Pemanfaatan Kompetensi SDM Terdiklat untuk mendukung Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern**
- b. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan**

Rumusan tujuan ini dilandasi dengan pemikiran bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik akan terwujud dengan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal dan terkelola dengan baik, yang salah satunya adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Peningkatan kapasitas APIP dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi bagi auditor di lingkungan Instansi Pemerintah.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan indikator kinerja tujuan. Indikator tujuan yang pertama adalah **Tingkat Kepuasan Stakeholder** sebagai Indikator untuk mengukur pemanfaatan kompetensi SDM terdiklat untuk mendukung penyelenggaraan SPI. Indikator tujuan yang kedua adalah **Tingkat Kepuasan Peserta diklat** yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur kualitas penyelenggaraan diklat.

Dalam mencapai tujuan strategis, maka dalam Renstra Pusdiklatwas BPKP 2015-2019 ditetapkan 2 sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari program program teknis Pusdiklatwas BPKP. yaitu:

- 1. Meningkatnya Kompetensi SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparatur Negara di Bidang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern**
- 2. Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan standar penyelenggaraan diklat**

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU Pusdiklatwas BPKP merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BPKP. Penetapan indikator dilaksanakan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis serta kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (*output*). IKU Pusdiklatwas BPKP adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Pusdiklatwas BPKP

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2015-2019
1.	Pemanfaatan kompetensi SDM terdiklat untuk mendukung Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern	Meningkatnya Kompetensi SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparatur Negara di Bidang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern	Presentasi SDM yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat	70%
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan standar penyelenggaraan diklat	Presentasi Diklat yang terselenggara dengan baik	90%

Untuk menjamin pencapaian target sasaran strategis pada akhir periode renstra tersebut, maka ditetapkan target capaian indikator sasaran strategis yang akan diukur setiap tahun dalam periode 2015-2019, dengan target tahunan sebagaimana tersaji pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Tahun 2015-2019

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya Kompetensi SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparatur Negara di Bidang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern	Presentasi SDM yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat	70	70	70	70	70
Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan standar penyelenggaraan diklat	Presentasi Diklat yang terselenggara dengan baik	90	90	90	90	90

D. NILAI NILAI LUHUR PUSDIKLATWAS BPKP

Dalam menjalankan mandatnya, Pusdiklatwas BPKP senantiasa bertumpu pada nilai-nilai luhur yang telah disepakati dan ditetapkan dalam rumusan nilai luhur BPKP. Nilai luhur adalah nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan diyakini sebagai sesuatu yang bersifat mulia yang peranannya sangat penting dalam merealisasikan misi-misi BPKP. Nilai-nilai BPKP ini dipilih dari berbagai nilai terpenting, yang urutan huruf awalnya dapat menjadi suatu kata kunci yang mengilhami seluruh staf BPKP yaitu PIONIR yang berarti pemrakarsa. Hal ini merupakan perwujudan dari keinginan untuk selalu berinovasi guna menghasilkan produk-produk yang berbeda dari produk para pengawas intern lainnya tetapi yang diyakini diterima karena dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan. Selengkapnyanya, nilai PIONIR itu adalah bentukan dari enam nilai di bawah ini:

Profesional
Integritas
Orientasi pada Pengguna
Nurani dan Akal Sehat
Independen
Responsibel

Masing-masing makna dari keenam nilai tersebut adalah:

1) Profesional

Profesionalitas menjadi kunci utama bagi keberhasilan pelaksanaan tugas BPKP, karena profesionalitas menjadi dasar bagi pengembangan citra BPKP untuk menjadi auditor atau aparat pengawas yang dapat dipercaya. BPKP sebagai suatu lembaga pemerintah, selain bekerja berdasarkan pada kaidah-kaidah dan standar-standar yang dibangun oleh komunitas profesi, juga bekerja berdasarkan pada kaidah-kaidah birokrasi. Kedua hal

tersebut harus diakomodasikan secara seimbang, sehingga terdapat kesesuaian antara identitas anggota organisasi dengan identitas organisasi dan menjadi profesional birokrat.

Profesionalitas melekat pada kegiatan pengawas intern pemerintah yang memahami ilmu pengawasan dan memiliki persyaratan kompetensi dan pengalaman untuk menerapkan ilmu tersebut dengan metodologi yang sistematis dan sikap kerja yang berintegritas, serta senantiasa berorientasi kepada penciptaan nilai tambah dalam pencapaian tujuan organisasi.

Profesionalitas juga menuntut auditor untuk terus memburu teknologi audit terbaik yang senantiasa ditingkatkan keunggulannya, agar dapat mengimbangi dinamika perkembangan kebutuhan *stakeholders* yang beraneka ragam dan tuntutan kualitas yang standarnya meningkat dari waktu ke waktu. Dalam kaitan ini kebutuhan mendesak yang perlu dikembangkan adalah kapasitas untuk melakukan *assessment* terhadap penerapan *good governance*, evaluasi kebijakan publik, manajemen risiko, audit sosial, *forensic auditing*, dan untuk meningkatkan kepedulian dan pemahaman *stakeholders* atas berbagai hal yang menjadi *audit issues*, serta kapasitas untuk memberikan saran dan masukan bagi keperluan perumusan perundang-undangan dan kebijakan berskala nasional.

2) Integritas

Integritas adalah nilai yang mengandung makna gabungan dari kejujuran, objektivitas, keberanian, konsistensi, dan konsekuensi. Nilai pengawasan, selain bergantung pada kompetensi pengawas, juga sangat dipengaruhi oleh integritas. Pengawas yang kompeten akan dapat menyalahgunakan ilmunya ketika tidak disertai dengan integritas.

Integritas adalah kombinasi dari keteguhan sikap dalam mempertahankan prinsip dan etika profesionalisme, konsistensi dalam menjaga dedikasinya pada pelaksanaan tugas, dan kemampuan untuk memberikan pertanggungjawaban yang dilandasi dengan kejujuran, yang mencakup masalah etika dan spiritual, di samping mengedepankan nilai keteladanan dan nilai kejujuran. Oleh karena itu, integritas merupakan hal yang paling fundamental dan akan mempengaruhi keseluruhan perilaku individu dan kelompok dalam melaksanakan setiap kewajiban dan memberikan tanggungjawab atas tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

3) Orientasi pada Pengguna

Nilai ini sangat konsisten dengan arus besar perubahan manajemen pemerintahan saat ini. Dengan dipraktikkannya manajemen pemerintahan berbasis kinerja, nilai ini adalah nilai yang paling jelas menunjukkan bahwa BPKP berani menangkap dan mengembangkan spirit kewirausahaan. BPKP memiliki misi untuk dapat memberi manfaat/nilai tambah kepada *stakeholders*, auditan dan pengguna jasa. Oleh karena itu, orientasi kepada pengguna merupakan faktor kunci untuk menentukan dan merancang kegiatan pengawasan BPKP yang memang diperlukan dan memberikan nilai tambah/manfaat kepada stakeholder.

4) Nurani dan Akal Sehat

Nilai yang dikekalkan dari nurani dan akal sehat adalah nilai untuk bertindak proporsional, menghindari diri dari praktik pengawasan yang berlebihan. Dengan mempertimbangkan nurani dan akal sehat, auditor ditantang untuk menerapkan etika pengawasan pada tahapnya yang tertinggi, bukan hanya sekedar sebuah kekakuan sikap untuk menaati peraturan dan sikap mengukuhkan kebenaran bagi orang banyak sebagai kebenaran tertinggi, yang pada struktur sosial yang timpang akan mengekalkan tirani mayoritas. Auditor yang berintegritas mestinya mampu mengandalkan suara nurani dan akal sehat. Nurani merupakan sumber pertimbangan kebaikan etika dalam tahapnya yang

tertinggi. Dengan *platform* etika seperti ini, jika memang pengawas intern konsisten dan konsekuen hendak mentransformasikan manajemen pemerintahan ke arah manajemen yang disemangati oleh kewirausahaan, maka pengawas harus berani mengutamakan esensi kinerja daripada kepatuhan hukum, jika ternyata justru hukum tersebutlah yang tidak sejalan dengan pencapaian kinerja yang optimal.

5) Independen

BPKP selain memberikan laporannya langsung kepada para pemimpin lembaga eksekutif, BPKP pun tidak dapat mengelak dari kewajiban untuk memaparkan hasil pengawasannya kepada DPR manakala diminta, tentunya dengan memperhatikan kaitannya dengan aspek kode etik profesi. Dengan demikian jelas bahwa penyajian yang dua arah ini akan mengharuskan BPKP mengambil sikap independen. Terlepas dari arah pertanggungjawaban di atas, independensi mencakup independensi dalam sikap dan dalam penampilan. Mungkin secara organisatoris keberadaan BPKP di bawah Presiden tetap tak akan pernah menjadikannya independen terhadap Presiden. Namun, ketika BPKP dapat secara partisipatoris menentukan agenda pengawasan sesuai dengan kebutuhan Presiden, maka terhadap apapun yang diawasi oleh BPKP, sikap independensi secara faktual dapat dilaksanakan.

6) Responsibel

Responsibel adalah sikap seorang yang mengakui adanya tanggung jawab yang bermula pada dirinya (*obligation to act*). Ini adalah salah satu sikap yang dipercaya merupakan komponen dari proses *good governance*. Dengan adanya kejelasan tanggung jawab, seseorang akan dapat bekerja secara terarah sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya. Pada akhirnya, tanggung jawab akan membimbing seseorang untuk menuntaskan tanggung jawabnya tersebut lewat upaya akuntabilitas (*obligation to answer*). Sebagai pengawas internal, tanggung jawab adalah nilai yang memungkinkan seluruh staf BPKP mengidentifikasi dirinya sebagai bagian tak terpisahkan dari manajemen pemerintahan, yaitu untuk bersama-sama dengan manajemen mengupayakan pencapaian tujuan manajemen. Tersirat di sini bahwa BPKP adalah mitra, yang turut memahami dan berniat menanggung tanggung jawab manajemen pemerintahan, khususnya dalam menciptakan proses *good governance*, meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan iklim manajemen yang terbebas dari praktik KKN.

Dari nilai luhur BPKP tersebut, Pusdiklatwas BPKP menambahkan lagi tiga motto budaya kerja yang dianut dan dilaksanakan dalam keseharian pelaksanaan tugas seluruh jajaran pegawai, yaitu 2MI (dibaca: Two MI = Tumi) yang mengandung arti Melayani, Mendidik dan Inovasi. Motto tersebut diciptakan pada tahun 2009 dan diresmikan pada saat peringatan HUT BPKP ke-26 tanggal 30 Mei 2009. Motto itu dihasilkan melalui brainstorming (curah pendapat) secara aktif oleh seluruh anggota satgas budaya kerja dan pegawai Pusdiklatwas lainnya dan dilandasi oleh nilai-nilai luhur pusdiklatwas BPKP yaitu: (1) Keunggulan; (2) Hidup yang Berarti; (3) Profesionalisme; (4) Integritas; (5) Kemitraan; dan (6) Kerjasama.

E. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Pencapaian misi akan sangat bergantung pada keberadaan faktor kunci keberhasilan. Faktor ini sendiri tentu dirumuskan sebagai hasil dari suatu analisis lingkungan eksternal dan internal yang mempengaruhi baik secara menguntungkan maupun merugikan bagi Pusdiklatwas BPKP. Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*) sebagaimana diuraikan pada

bagian sebelumnya. Dari analisis SWOT ini dapat diidentifikasi beberapa factor kunci keberhasilan berikut ini :

1) Tersedianya SDM yang kompeten di bidang diklat pengawasan dan kapasitas kelembagaan yang memadai

Pusdiklatwas BPKP sangat bertumpu pada ketersediaan sumber daya manusia yang profesional. Sebagai konsekuensinya, diperlukan manajemen sumber daya manusia yang baik, diantaranya yaitu pola rekrutmen yang jelas, pengembangan karir yang transparan, penetapan indikator kinerja yang komprehensif, penerapan sistem penghargaan dan penghukuman, pendidikan profesional yang berkelanjutan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung upaya peningkatan kinerja sumber daya manusia tersebut. Tersedianya widyaiswara/instruktur dengan keandalan kompetensinya yang dipadukan dengan pengalaman dalam praktik pengawasan dapat memberikan manfaat maksimum bagi *customers*. Kemampuan profesional mereka senantiasa dikembangkan secara berkelanjutan, sehingga akan meningkatkan kemampuan dalam menyampaikan materi diklat yang merupakan faktor penting dalam proses *transfer of knowledge*. Cara dan metode yang digunakan widyaiswara/instruktur dalam proses *transfer of knowledge* akan sangat membantu *customers* memahami dan menguasai materi diklat. Selain itu, dimilikinya sikap tanggap, partisipatif, dan proaktif terhadap kebutuhan *stakeholders/customers* oleh sumber daya manusia Pusdiklatwas BPKP, merupakan tuntutan yang harus dipenuhi. Akhirnya, komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Pusdiklatwas BPKP untuk memfungsikan Pusdiklatwas BPKP semaksimal mungkin merupakan hal paling penting bagi pelaksanaan seluruh tugas pokok dan fungsi Pusdiklatwas BPKP.

2) Kewenangan dari peraturan perundang-undangan

Terbitnya PP 60/2008 tentang SPIP pasal 59 huruf c menyatakan bahwa pembinaan penyelenggaraan SPIP yang dilakukan oleh BPKP antara lain meliputi kegiatan menyelenggarakan diklat SPIP. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/VII/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan angka kreditnya yang menyatakan bahwa BPKP ditunjuk sebagai Pembina Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yaitu suatu fungsi yang diberikan secara khusus kepada BPKP. Fungsi ini sangat strategik karena BPKP harus mengembangkan kompetensi SDM pengawasan di seluruh unit kerja pengawasan yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini mengharuskan Pusdiklatwas bekerja sama dengan Pusbin JFA dalam mengembangkan kegiatan kediklatan JFA. Selain itu juga harus melaksanakan pembinaan penyelenggaraan SPIP kepada seluruh unit kerja pusat dan daerah. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan BPKP, semakin melebarkan langkah Pusdiklatwas BPKP untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka pembinaan SDM di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah maupun Non Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

3) Tersedianya program diklat dan materi diklat pengawasan yang berkualitas

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pusdiklatwas BPKP menuntut adanya instrumen yang selain memiliki *comparative advantages* juga memiliki *competitive advantages* dibandingkan dengan yang dikembangkan lembaga diklat pemerintah lainnya. Perubahan lingkungan yang menyentuh keberadaan Pusdiklatwas BPKP juga menuntut adanya pemutakhiran metoda dan prosedur pelaksanaan tugas. Rekayasa ulang sistem dan prosedur kerja yang tepat diperlukan dalam rangka mendukung proses kerja untuk menghasilkan program diklat dan materi diklat pengawasan yang berkualitas.

4) Memiliki jaringan diklat dan informasi melalui Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia

BPKP dengan struktur organisasi yang tersebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia, memiliki sistem jaringan kerja dan informasi yang tersebar secara luas, dalam rangka koordinasi proses kegiatan seluruh unit kerja. Oleh karena itu, dukungan system jaringan kerja dan informasi tersebut diperlukan dalam rangka merespon setiap perubahan yang ada, mengingat *stakeholders /customers* Pusdiklatwas BPKP tersebar di tingkat provinsi/kota/kabupaten di seluruh wilayah Indonesia.

5) Memiliki pengalaman dalam bidang diklat pengawasan

Selama menapaki perjalanan sejarahnya sejak tahun 1983, berbagai jenis diklat di bidang pengawasan telah diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP. Namun demikian, berbagai jenis diklat tersebut bukan semata-mata dapat memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan SDM pengawasan dalam mengantisipasi tantangan di masa yang akan datang

6) Kebutuhan diklat pengawasan untuk mewujudkan *good governance*

Upaya pencapaian sasaran strategik yang terarah dan terfokus pada sasaran strategik yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional merupakan wujud dari respon terhadap kepentingan *stakeholders/customers*. Salah satu sasaran strategik yang tertuang dalam RPJM Nasional tersebut adalah penerapan *good governance*. Dengan demikian, hal tersebut akan memperjelas tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Pusdiklatwas BPKP dalam rangka membantu pemerintah menerapkan *good governance*.

7) Meningkatkan tuntutan profesionalisme di bidang pengawasan

Mengelola diri di dalam lingkungan yang terus berubah menjadi keharusan Pusdiklatwas BPKP dengan jalan antara lain mengandalkan profesionalisme, keluwesan, dan pendekatan partisipatif lebih dalam daripada jiwa birokrasi yang bergantung pada kewenangan dan legalitas yang kaku, tanpa harus mengorbankan integritas. Dengan demikian, Pusdiklatwas BPKP diharapkan dapat menyiasati tantangan dan hambatan sehingga mendapatkan peluang bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, ditambah dengan kompetensi yang terus diasah akan memungkinkan *stakeholders/customers* untuk senantiasa meminta layanan Pusdiklatwas BPKP.

8) Pemanfaatan kemajuan teknologi dalam bidang diklat pengawasan

Tersedianya fasilitas jaringan, *website*, serta sarana dan prasarana teknologi informasi lainnya sangat mendukung sistem jaringan kerja dan informasi yang tersebar secara luas dalam rangka koordinasi proses kegiatan seluruh unit kerja BPKP. Dengan demikian, hambatan dalam komunikasi dengan seluruh unit kerja BPKP dapat diminimalisasi.

9) Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi

Pengembangan sistem dan teknologi informasi mempunyai arti penting dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategik yang telah ditetapkan. Untuk dapat mencapai hal tersebut, pengembangan sistem dan teknologi informasi harus dikelola secara sistematis dan terarah sejak tahap perencanaan, perancangan, konstruksi, implementasi sampai dengan tahap pemeliharaannya. Pengembangan sistem dan teknologi informasi tersebut meliputi :

- (1) Pengembangan Sistem Administrasi Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Pengembangan *Web Site*.
- (3) Pengembangan *Mailing* dan *Collaboration System*.
- (4) Pengembangan Aplikasi Multimedia (*E-Learning*), Registrasi *Online* dan *Ujian Online*
- (5) Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Sistem dan Teknologi Informasi.
- (6) Pembuatan SOP dan Manual Penggunaan Aplikasi.
- (7) Pelatihan dan Sosialisasi.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam lima tahun mendatang serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran strategis BPKP dan sasaran strategis Pusdiklatwas BPKP. Penyusunan arah kebijakan dan strategi yang dijabarkan dalam program dan kegiatan Pusdiklatwas BPKP mengacu kepada aturan perundangan yang mendasari tugas pokok dan fungsi Pusdiklatwas BPKP, serta mempertimbangkan potensi sumber daya Pusdiklatwas BPKP dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

A. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PUSDIKLATWAS BPKP

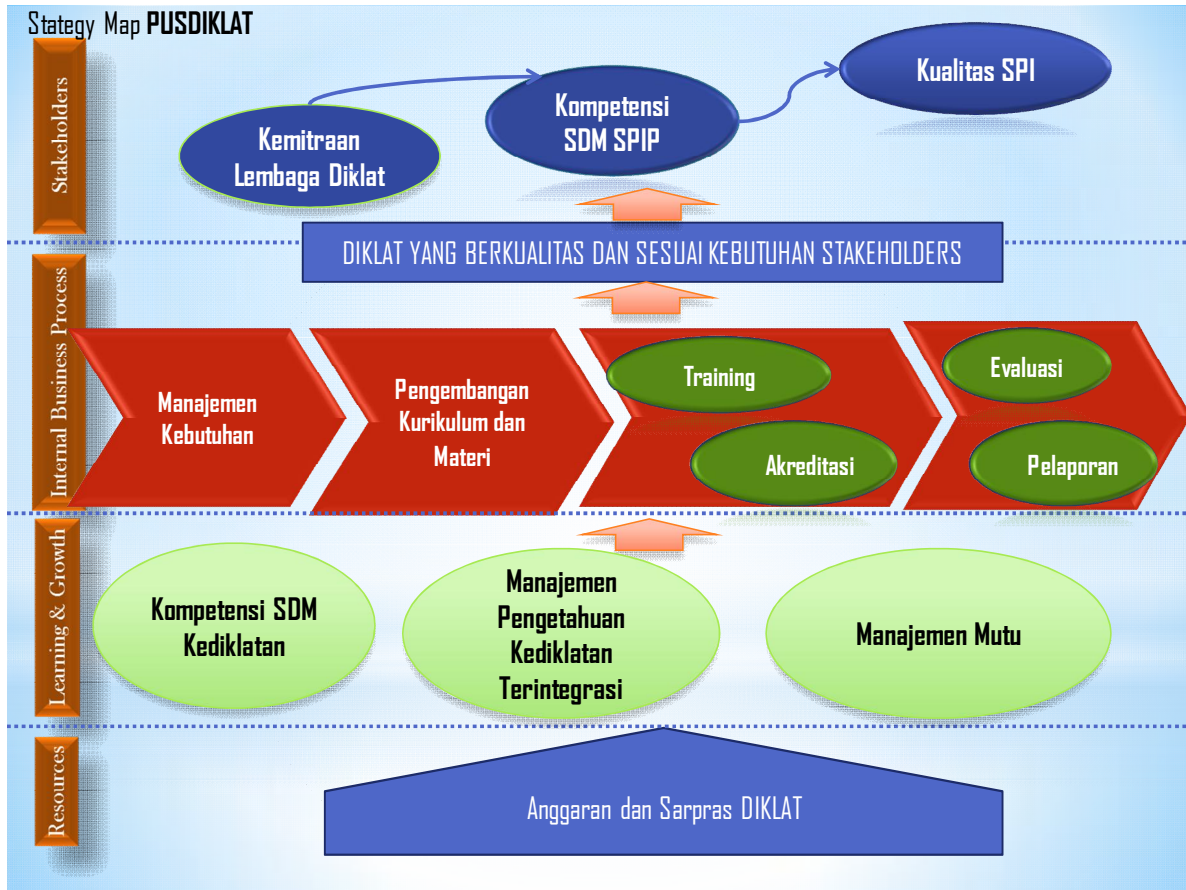
Dalam rangka mendukung capaian visi dan misi BPKP, Pusdiklatwas BPKP telah memperbarui visi dan misinya sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Visi dan Misi Pusdiklatwas BPKP diarahkan, bahwa untuk menjadi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Profesional berarti Pusdiklatwas BPKP dalam memberikan pelayanan dan pembinaan terhadap Aparatur Negara harus dengan integritas tinggi yang didukung profesionalisme yang tinggi sehingga dapat diandalkan untuk memberikan hasil kerja yang berkualitas dan bermanfaat bagi *stakeholders/customers*. Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, Pusdiklatwas BPKP menyusun strategi dengan menyeimbangkan pemenuhan kepentingan pihak luar dan pembenahan ke dalam. Pusdiklatwas BPKP mengadopsi konsep *Balanced Scorecard* (BSC) dengan beberapa modifikasi (versi BPKP) disesuaikan dengan karakteristik organisasi publik. Berbeda dengan konsep BSC di sektor privat yang berorientasi profit, BPKP memodifikasi Perspektif Keuangan menjadi Perspektif Manfaat Bagi *Stakeholder* dan Perspektif Pelanggan menjadi Perspektif Manfaat Bagi Pengguna Jasa. Dengan menggunakan pendekatan strategi berimbang (*balanced scorecard*) tersebut, maka tujuan-tujuan utama dari perspektif manfaat bagi pihak *stakeholders* utama dan manfaat kepada pengguna jasa diseimbangkan dengan tujuan-tujuan pendukung yang berada pada perspektif proses internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang berorientasi ke dalam.

Peta strategi tersebut merupakan penjabaran hal-hal yang sifatnya strategis dan menjadi *roadmap* bagi organisasi dalam mencapai visi, misi dan tujuannya. Empat perspektif yang digunakan meliputi: Manfaat bagi *Stakeholder*, Manfaat bagi Pengguna Jasa, Proses Internal, dan Pertumbuhan dan Pembelajaran. Perspektif Manfaat bagi *Stakeholder* menjelaskan manfaat/nilai tambah yang dapat diberikan kepada *stakeholder* dari kegiatan kediklatan yang dilakukan oleh Pusdiklatwas BPKP.

Perspektif Manfaat bagi *Stakeholder* dicapai melalui keberhasilan Pusdiklatwas BPKP memenuhi ekspektasi pengguna jasa yang diwujudkan dengan dimanfaatkannya hasil diklat, kepuasan pengguna jasa, dan meningkatnya permintaan jasa kediklatan. Dimanfaatkannya hasil diklat dan meningkatnya permintaan jasa mengindikasikan bahwa pengguna jasa puas dengan hasil kerja Pusdiklatwas BPKP. Pemanfaatan hasil diklat mendorong tercapainya tujuan strategis dalam perspektif manfaat bagi *stakeholder*.

Kinerja pada perspektif manfaat bagi *stakeholders* dan bagi pengguna jasa dapat tercapai jika didukung proses internal yang berkualitas, diindikasikan dengan tersedianya modul diklat yang mutakhir dan analisis kebutuhan diklat, efektivitas evaluasi diklat, terlaksananya pemberian jasa yang *appropriate*, berkualitas, tepat waktu dengan biaya yang efisien.

Gambar 3.1
Peta Strategi Pusdiklatwas BPKP



Selanjutnya, seluruh hal tersebut di atas akan tercapai apabila Pusdiklatwas BPKP berhasil mengelola pilar kinerja organisasi. Pilar kinerja ini terdapat dalam perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran yang terdiri dari tiga modal utama yaitu modal organisasi (*organization capital*), modal sumber daya manusia (*human capital*), dan modal sistem informasi dan prosedur (*information capital*). Oleh karena itu, dalam konteks *organization capital*, Pusdiklatwas BPKP akan menyesuaikan dengan arah penataan organisasi yang akan dilaksanakan oleh BPKP Pusat, peningkatan dan penyempurnaan proses bisnis, serta menciptakan iklim kerja yang kondusif.

Dalam pengelolaan *human capital*, Pusdiklatwas BPKP telah dan akan berupaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Guna meningkatkan kapasitas dengan mengikutsertakan pegawai dalam diklat jangka pendek baik di dalam negeri maupun di luar negeri
- (2) Mengikutsertakan widyaiswara dalam diklat-diklat peningkatan kompetensi
- (3) Mengikutsertakan pegawai/widyaiswara dalam seminar/workshop yang relevan
- (4) Mengikutsertakan pegawai/widyaiswara dalam jenjang pendidikan S2/S3
- (5) Melakukan studi banding ke lembaga diklat lainnya yang dianggap lebih baik
- (6) Menerapkan program Budaya Kerja yang efektif
- (7) Terkait dengan *information capital*, Pusdiklatwas BPKP telah melakukan pengembangan sistem informasi dan prosedur kerja sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan Penyusunan Quality Procedures (QP) yang aplikatif sesuai dengan tuntutan *ISO 9001:2008*
- b. Pengembangan dan implementasi pembelajaran dengan program *E- Learning*
- c. Pengembangan dan pemeliharaan Website Pusdiklatwas BPKP
- d. Pengembangan Sistem informasi Kediklatan

Secara umum dapat diikhtisarkan bahwa keberhasilan Pusdiklatwas BPKP dalam menata organisasi secara tepat, mengelola SDM, menyediakan sistem informasi yang memadai akan mendorong terwujudnya proses internal pemberian jasa yang memenuhi ekspektasi pengguna jasa. Selanjutnya, keberhasilan dalam memenuhi ekspektasi pengguna jasa akan mendorong terwujudnya manfaat bagi stakeholder dan memperbesar serta memperluas peran Pusdiklatwas BPKP sebagai Lembaga Diklat Profesional dalam Mendukung Upaya Pemerintah Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas.

Dengan menggunakan keempat perspektif, Pusdiklatwas BPKP menetapkan arah kebijakan dan strategi Tahun 2015-2019. Arah kebijakan dan strategi tersebut ditetapkan untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi Pusdiklatwas BPKP dalam lima tahun mendatang.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyusunan program dan kegiatan pada Renstra Pusdiklatwas BPKP 2015-2019 mengacu pada program dan kegiatan dalam Renstra BPKP Tahun 2015-2019. Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu/lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kementerian/Lembaga. Terdapat dua jenis program, yaitu program teknis dan program generik. Program teknis merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal), sedangkan program generik merupakan program-program yang digunakan oleh beberapa organisasi eselon I A yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). Berdasarkan restrukturisasi program, untuk setiap LPND menggunakan satu program teknis yang spesifik untuk LPND tersebut dan satu atau beberapa program generik. Dengan mempertimbangkan restrukturisasi program yang dirancang oleh Bappenas, dalam Renstra Pusdiklatwas BPKP 2015-2019 ditetapkan Program BPKP sebanyak dua program yaitu:

1. Program Teknis: Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
2. Program Generik: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP.

Sebagai unit kerja yang memberikan layanan dukungan, Pusdiklatwas ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan/kelancaran program BPKP tersebut, dengan melaksanakan dua program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP dan Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam periode Renstra Pusdiklatwas BPKP 2015-2019. Program, sasaran program, dan indikator kinerja program, sebagaimana tersaji pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Program, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Program
Pusdiklatwas BPKP Tahun 2015

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
1.	Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Meningkatnya Kompetensi SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparatur Negara di Bidang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern	Presentasi SDM yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis Penyelenggaraan Diklat	Persentase diklat yang terselenggara dengan baik

Sedangkan untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut dilaksanakan kegiatan dengan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan sebagaimana tersaji pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan
Pusdiklatwas BPKP Tahun 2015

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1.	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan bagi Intern BPKP dan APIP	Pengembangan Kapasitas, Kualitas SDM, dan Kompetensi	Jumlah peserta diklat Kedinasan, Teknis Substansi, dan Fungsional Auditor
		Standarisasi/ Sertifikasi, Perencanaan, dan Monev Kinerja	1. Jumlah laporan penyelenggaraan ujian 2. Jumlah sistem diklat berbasis kompetensi

2.	Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana	Termanfaatkannya Aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan 7 skala likert	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya alat pengolah data BPKP 2. Terlaksananya rehabilitasi berat mess Pusdiklatwas 3. Tersedianya peralatan dan fasilitas Perkantoran Pusdiklatwas
3	Pengembangan kompetensi pegawai Pusdiklatwas	Meningkatnya KSA SDM pengelola dan penyelenggara diklat	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Seminar/ Workshop/Diklat

C. TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

Target Kinerja Sasaran (*output*) dan kerangka pendanaan Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan terlampir sebagaimana pada Matriks Kinerja dan Pendanaan Rencana Strategis Pusdiklatwas BPKP 2015-2019.

BAB IV PENUTUP

Dalam penyusunan RPJMN 2015-2019 telah dilakukan restrukturisasi program dan kegiatan untuk menjamin koherensi dan sinkronisasi program-program Kementerian/Lembaga. Restrukturisasi program dan kegiatan tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2015-2019. Rencana Strategis Pusdiklatwas BPKP Tahun 2015-2019 mengadopsi Renstra BPKP 2015-2019 yang sudah diselaraskan dengan restrukturisasi program dan kegiatan serta mengacu kepada Pedoman Penyusunan Renstra – Kementerian Lembaga Tahun 2015-2019 seperti diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 5 Tahun 2009 yang diterbitkan tanggal 11 Agustus 2009. Renstra ini merupakan komitmen bersama seluruh jajaran Pusdiklatwas BPKP yang wajib ditegakkan dan dilaksanakan agar dapat tercapai visi, misi, dan tujuan Pusdiklatwas BPKP. Tujuan tersebut tidak semata untuk kepentingan sendiri, namun untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan pencapaian visi, misi dan tujuan BPKP. Rencana Strategik ini disusun sebagai bagian dari upaya mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan stratejik yang terjadi. Dengan demikian proses pencapaiannya akan dapat dilalui secara lebih terarah dan terencana. Yang jelas, substansi Rencana Strategik masih perlu dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT), sehingga sangat memungkinkan untuk direalisasikan, dipantau pelaksanaannya dan dievaluasi. Akhirnya, menjadi tugas dan kewajiban seluruh jajaran Pusdiklatwas BPKP, untuk bersama-sama melangkah dalam tindakan yang harmonis untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis ini.

LAMPIRAN 1:
Matrik Kinerja dan Pendanaan

KODE			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	Target					Alokasi (Rp Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
089	06		Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah													
089	06	3674	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan	Pengembangan Kapasitas, Kualitas SDM dan Kompetensi						79,0	82,9	87,1	91,0	95,1	435,1	
					Jumlah Peserta Diklat Kedinasan (orang)	73	73	73	73	73						
					Jumlah Peserta Diklat Teknis Substansi (RM)	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040						
					Jumlah Peserta Diklat Teknis Substansi (PNBP)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500						
					Jumlah Peserta Diklat Fungsional Auditor (RM)	2.620	2.770	2.950	2.950	2.950						
					Jumlah Peserta Diklat Teknis Substansi (STAR) (orang)	1.170	1.540	1.140	-	-						
					Jumlah Peserta Diklat Fungsional Auditor (STAR) (orang)	990	1.200	1.500	-	-						
				Standardisasi/Sertifikasi, Perencanaan dan Monev Kinerja												
					Jumlah laporan penyelenggaraan diklat (Lap)	3	3	3	3	3						
					Tersedianya sistem diklat berbasis kompetensi (Paket)_RM	1	1	1	1	1						
					Tersedianya sistem diklat berbasis kompetensi (Paket)_STAR	1	1	1	1	1						